



## **Pendampingan Masyarakat Rencana Penggunaan Sumber Daya Air Sungai Wolo di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka**

**Viska Inda Variani<sup>1</sup>, Muhammad Zamrun Firihi<sup>1</sup>, Armid<sup>2</sup>, Fahmiati<sup>2\*</sup>, Uniadi Mangidi<sup>3</sup>, Rini Sriyani<sup>3</sup>, Wayan Mustika<sup>3</sup>, Erick Nov Putra<sup>3</sup>, Anafi Minmahddun<sup>3</sup>, Yustika Intan Permatahati<sup>4</sup>, Dedy Oetama<sup>4</sup>, Muhamad Alim Marhadi<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>3</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>4</sup>Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

### **ABSTRACT**

*The plan to extract water from the Wolo River by building an intake building in the Wolo River watershed has a potential conflict with the community. This is due to community concerns concerning the loss of access to water use after the intake construction. To avoid this conflict, the Halu Oleo University community service team initiated a Community Consultation Meeting (CCM) which aimed to explain the process of constructing the Wolo River intake and how the industry draws water. This activity at the same time answered the community's concerns regarding the impact of the intake construction on the daily conditions of the residents. All answers were given based on scientific studies in accordance with applicable standards and regulations. The explanation as far as possible was able to understand by the general public. The process of implementing the Community Assistance Activities Plan for the Use of Water Resources of the Wolo River in Wolo Village, Wolo District, Kolaka Regency was expected to increase public understanding regarding the use of water by industry. As one of the duties of the Tridharma of Higher Education, this community service activity in the form of mentoring is very important to avoid misunderstandings in the community. This service activity can continue, considering that the community has a role in supervising water extraction activities by industries regulated by law.*

**Keywords :** Mentoring; Conflict; Water resources; Community Consultation Meeting

### **ABSTRAK**

Rencana pengambilan air oleh industri yang bersumber dari Sungai Wolo dengan membangun bangunan pengambil (intake) di daerah aliran Sungai Wolo berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Hal ini disebabkan kekhawatiran masyarakat akan hilangnya akses penggunaan air pasca pembangunan intake. Untuk menghindari konflik tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat UHO menggagas Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk menjelaskan proses pembangunan intake Sungai Wolo dan bagaimana proses pengambilan air oleh industri. Kegiatan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dampak pembangunan intake terhadap kondisi keseharian warga. Semua jawaban yang diberikan berdasarkan kajian ilmiah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Penjelasan sedapat mungkin dapat dimengerti oleh masyarakat awam. Proses pelaksanaan kegiatan Pendampingan Masyarakat Rencana Penggunaan Sumber Daya Air Sungai Wolo di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan air oleh industri. Sebagai salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari salah paham di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dapat terus berlangsung, mengingat masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kegiatan pengambilan air oleh industri yang diatur oleh undang-undang.

**Kata Kunci :** Pendampingan; konflik; Sumber air; Pertemuan Konsultasi Masyarakat

**Correspondence :** Fahmiati  
Email : fahmiati@uho.ac.id

## PENDAHULUAN

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memiliki luas 371,24 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 21.197 jiwa, kepadatan penduduk 100 jiwa/km<sup>2</sup> dan tingkat pertumbuhan penduduk 2,11% per tahun. Jarak kecamatan Wolo dengan ibu kota Kabupaten Kolaka ± 90 KM, dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan waktu tempuh ± 120 Menit. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Iwoimendaa Kabupate Kolaka, Sebelah Barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan di Teluk Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur. Mata Pencaharian penduduk kecamatan Wolo 70% adalah petani dan nelayan sedangkan 30% bermata pencaharian sebagai Wirasaha, Pegawai Negeri Sipil, Buruh, Wiraswasta dan lain-lain. Curah hujan rata-rata mencapai 1.673,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 160 hari/tahun dan kelembaban udara antara 63% sampai 84%. Suhu udara maksimum berkisar antara 33,80 – 36,60C, dan suhu minimum antara 18,20 – 23,60C. Tekanan udara berkisar antara 1.010,5 – 1.013,6 mb dengan kecepatan angin antara 2-4 knot [1].

Lokasi PKM ini berada di Kelurahan Wolo, yang merupakan ibu kota Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Keadaan geografisnya didominasi oleh daerah perbukitan dan sebelah barat berbatasan dengan laut. Tingkat pendidikan penduduknya rata-rata lulusan SMA, namun ada juga yang sudah menempuh pendidikan tinggi (S1 sampai S3). Mata pencaharian yang utama adalah sebagai petani dan petambak. Sebagai petani dan petambak, aliran Sungai Wolo memegang peran vital dalam menyuplai kebutuhan air untuk keperluan irigasi sawah dan tambak karena tidak ada sumber air lain yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengairi sawah dan tambak .

Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan, banyak kawasan di daerah Sulawesi Tenggara yang beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan, salah satunya industri tambang nikel yang berada di Kelurahan Wolo,

Kecamatan Kolaka. Keberadaan industri pertambangan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Wolo seperti penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan dan berkembangnya usaha kuliner dan penginapan sehingga mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk mendirikan smelter untuk memberikan nilai tambah pada mineral logam sebelum di ekspor [2]. Smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Salah satu komponen penting dalam pembangunan dan pengoperasian smelter adalah tersedianya air yang cukup. Air berfungsi dalam proses granularisasi nikel [3,4]. Industri yang berada di Kecamatan Wolo berencana mengambil air yang bersumber dari Sungai Wolo dengan membangun bangunan pengambil (intake) di daerah aliran Sungai Wolo. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat sehingga berpotensi menjadi konflik antara pihak industri dan masyarakat [5].

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui akses pengambilan air masyarakat setelah pengambilan air oleh smelter, dampak pengambilan air terhadap kebutuhan air irigasi masyarakat, dampak pengambilan air terhadap muka air sumur dan potensi pencemaran sungai akibat pengambilan air oleh smelter.

## METODE

Model penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat ditujukan sebagai upaya mengembangkan program edukasi kepada masyarakat melalui pola-pola yang lebih berorientasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia [6]. Keterlibatan secara langsung

dan bersama-sama masyarakat menghadapi dan menyelesaikan masalah. Karena selain memberikan manfaat kepada masyarakat di satu sisi, pola semacam ini juga secara akademis merupakan implementasi nilai-nilai keilmuan dosen yang mengemban fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyuluhan ini menyangkut materi pemahaman penggunaan air untuk industri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Lokasi PKM ini berada di Kelurahan Wolo, yang merupakan ibu kota Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan PKM Pendampingan Masyarakat Rencana Penggunaan Sumber Daya Air Sungai Wolo di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan (Chambers, 1996).
2. Model *Community development* yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek dan obyek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Alfitri, 2011).
3. Edukatif yaitu pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat.

## HASIL

Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait permasalahan pembangunan intake Sungai Wolo untuk industri. Prosesnya dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pendampingan masyarakat melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM). Kegiatan ini menjadi wadah bagi semua stakeholder yang akan memanfaatkan sungai Wolo khususnya perusahaan dan masyarakat sekitar. Kegiatan PKM ini difasilitasi

oleh pihak universitas dalam menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pembangunan intake Sungai Wolo.

Rangkaian kegiatan pendampingan masyarakat Rencana Penggunaan Sumber Daya Air Sungai Wolo di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM): Sambutan dari perwakilan pemerintah



Gambar 2. Proses kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM): Penyampaian materi



Gambar 3. Proses kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM): Pertanyaan dari masyarakat

## PEMBAHASAN

Salah satu inti kegiatan PKM adalah menjelaskan proses pembangunan intake sungai Wolo dan bagaimana proses pengambilan air oleh industri. Kegiatan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dampak pembangunan intake terhadap kondisi keseharian warga. Semua jawaban yang diberikan berdasarkan kajian ilmiah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Penjelasan sedapat mungkin dapat dimengerti oleh masyarakat awam.

Keunggulan dari kegiatan PKM seperti ini adalah dapat menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dan industri. Mengingat, sering kali terjadi tindakan anarkis oleh masyarakat disebabkan salah paham yang terjadi tanpa adanya penjelasan dari pihak industri. Disamping itu, pihak universitas sebagai fasilitator berperan dalam menafsirkan maksud dari pihak perusahaan sehingga dapat dimengerti masyarakat serta menjelaskan kepada masyarakat terkait Batasan-batasan yang dapat dilakukan. Kesimpulan dari kegiatan ini dituangkan dalam berita acara sebagai lampiran dokumen yang wajib disiapkan sebagai persyaratan dalam mengurus izin penggunaan air di Sungai Wolo.

Keunggulan kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat seperti ini adalah keluhan-keluhan masyarakat terkait permasalahan yang ada dapat terjawab sehingga dapat meredam potensi konflik ditengah-tengah masyarakat.

Proses pelaksanaan kegiatan Pendampingan Masyarakat Rencana Penggunaan Sumber Daya Air Sungai Wolo di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan air oleh industri. Sebagai salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari salah paham ditengah-tengah masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau partisipasi dan emansipasi para warganya

dalam program pembangunan [7,8]. Pemberdayaan masyarakat dalam sudut pandang yang lain dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternative [9,10]. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat [11,12].

Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya [13], karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat [9,14,15].

Seperti halnya wacana di atas bahwa kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan status perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Wolo.

Kegiatan pengabdian ini dapat terus berlangsung, mengingat masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kegiatan pengambilan air oleh industri yang diatur oleh undang-undang.

## SIMPULAN

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencapai keberhasilan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari masyarakat, keberhasilan ini terlihat dari cukup banyak minat warga menghadiri kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat. Disamping itu, kegiatan pendampingan memiliki potensi keberlanjutan, mengingat proses pengawasan masyarakat terhadap industri terus berlangsung selama proses pengambilan air berlangsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pemberi dana kegiatan pemberdayaan masyarakat

(PT. Ceria Nugraha Indotama, Kolaka, Sulawesi Tenggara).

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Kolaka Dalam Angka. 2018. [[Link](#)]
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Internet]. Vol. 51, Paragraph. 2009. p. 53. [[Link](#)]
3. Chaerul M, Andana RF. Study Valuasi Smelter Pengolahan Nikel Melalui Pendekatan Analisa Biaya Manfaat (Studi Kasus: Perusahaan Tambang Nikel di Sulawesi Selatan). Jurnal Teknik Lingkungan. 2020;26(1). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Muttaqiyatin WP, Prakoso BS. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) di Kawasan Industri Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Papua. Jurnal Bumi Indonesia. 2017;6(1). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Listyawati H. Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Jurnal Mimbar Hukum. 2011;23(3):40668. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Mardimin J. Egoisme Sektoral & Kedaerahan Sebagai Tantangan Program Pembangunan Berkelanjutan (Kasus Pengelolaan & Pemanfaatan Sumber Air Senjaya di Perbatasan Wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga). Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, XXIII. 2014;2:131–148. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Suswanto B, Windiasih R, Sulaiman AI, Weningsih S. Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jurnal Sosial Soedirman. 2019;2(2):40–60. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Hatu R. Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis). Jurnal inovasi. 2010;7(04). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Lestariningsih SP, Manurung TF, Destiana D. Pendampingan Masyarakat dalam Pemanfaatan Nipah sebagai Olahan Pangan di Desa Sungai Kupah, Kuburaya. Jurnal Buletin Al-Ribaath. 2022;19(1):130–136. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Fauzan S, Firmansyah R, Putri DM, Putri SF, Jannah M. Pendampingan Penyiapan Cafe Pinggir Kali Sebagai Wujud Pemanfaatan Sungai Untuk Daya Tarik Wisata Alam Bumi Perkemahan Bedengan Desa Selorejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sinergi: Jurnal Pengabdian. 2021;3(1):8–13. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Widjajanti K. Model pemberdayaan masyarakat. 2011; [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Zubaedi MA. Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik. Kencana; 2016. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Rahmawati E, Kisworo B. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment. 2017;1(2):161–169. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
14. Aziz HMA, Halim A. Dakwah pemberdayaan masyarakat: paradigma aksi metodologi. Pustaka Pesantren; 2005. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
15. Hamid H. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca; 2018. [[Link](#)] [[Google Scholar](#)]